

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN
TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**
(Studi Pada Kantor BPKAD Kabupaten Luwu Utara)

Risnayanti

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo

E-mail: yrisna02@gmail.com

Abstract : Effect of the Internal Control Sistem and the Transparency of Regional Finances on the Quality of the Presentation of Financial Reports (Study at the BPKAD Office of the North Luwu Utara District).

This study aims to determine whether the internal control system and transparency of regional finances affect the quality of the presentation of local government financial reports. The population and sample of this study were employees who worked at the BPKAD office in North Luwu Regency. The data collection method used a questionnaire. Kueisoner research uses a Likert scale. Data analysis used multiple linear regression analysis using Statistical Packages for Social Science (SPSS). The results showed that the internal control system and regional financial transparency had a significant positive effect on quality presentation of local government financial reports.

Keywords: *internal control system, regional financial transparency, quality of presentation of local government financial reports.*

Abstrak : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor BPKAD Kabupaten Luwu Utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal dan transparansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dan sampel penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Kantor BPKAD Kabupaten Luwu Utara. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kueisoner penelitian menggunakan skala likert. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan *Statistical Packages for Social Science (SPSS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan transparansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: sistem pengendalian internal, transparansi keuangan daerah, kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap daerah pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *good governance*. Pemerintah yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di daerah, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Peran serta masyarakat dalam pemerintah sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam hal ini pelaksanaan perekonomian Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 yang disempurnakan (Permendagri) Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah disyaratkan bahwa kepada tiap-tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) untuk keperluan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan PKD (Pengelolaan Keuangan Daerah).

Satuan kerja yang memiliki fungsi sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara adalah BPKAD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dibidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku. Disamping sebagai pejabat pengelola keuangan daerah, BPKAD juga merupakan bendahara umum daerah.

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh suatu daerah atau perusahaan dalam mencapai tujuan. Dalam mewujudkan sistem pemerintah yang baik dan tepat, dibutuhkan suatu analisa dan evaluasi.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2006:68).

Berdasarkan undang-undang No.5 Tahun 1974 mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah, hak, wewenang serta kewajiban diserahkan kepada daerah untuk mengototserta mengurus rumah tangganya. Dalam operasional pemerintahan daerah dibutuhkan pembuatan laporan keuangan sebagai wujud pertanggung jawaban atas pengelolaan dana masyarakat. Hal ini diatur berdasarkan undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengenai keuangan Negara serta undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah.

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam peraturan pemerintah No 71 tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan Pemerintah. Tujuan umum laporan keuangan sektor publik menurut

Mardiasmo (2019:161) adalah kepatuhan dan pengelolaan, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, perencanaan dan informasi otorisasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat dan gambaran. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab pengelola organisasi. Laporan keuangan pemerintah yang baik menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 harus mencakup empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Untuk menghasilkan informasi yang relevan, laporan keuangan mempunyai beberapa karakteristik sesuai peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana sebuah laporan keuangan harus memiliki karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan karakteristik di atas, dapat di pahami dengan jelas standar kualitas laporan keuangan yang berlaku secara umum. Hal ini dapat menghasilkan pertanyaan selanjutnya, apakah laporan keuangan pemerintah daerah sudah sesuai standar yang berlaku? Apakah pencatatan keuangan pemerintah daerah sudah mengikuti prinsip akuntabilitas sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu kita pahami bahwa setiap tahunnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) melakukan penilaian atas laporan keuangan pemerintah, penilaian tersebut tentu dijalankan sesuai standar dan kriteria yang berlaku hingga akhirnya menghasilkan opini terhadap laporan keuangan pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Internal

Setiap organisasi yang ada termasuk pemerintah membutuhkan suatu alat pengendalian yang dapat menjamin bahwa

aktivitas organisasi telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. Adapun sistem pengendalian internal diterapkan untuk mencapai tujuan serta meminimalkan hal-hal yang terjadi di luar rencana, meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, meningkatkan keandalan data dalam laporan keuangan serta mendorong dipatuhinya hukum dan aturan yang diterapkan. Maka dari itu sistem pengendalian internal memiliki kedudukan yang sangat penting.

Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk melindungi kekayaan organisasi, mengecek ketelitian serta keandalan data akuntansi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan proses, metode, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan anggota lainnya untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013:163).

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Adapun Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut UU No. 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Teori Sinyal (*Signaling Theory*) menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah oleh rakyat akan memberikan sinyal kepada publik dengan menyediakan laporan keuangan yang andal (Monika, dkk. 2016). Laporan keuangan yang semakin andal dan penerapan SPI yang semakin baik merupakan bentuk sinyal yang baik dari pemerintah kepada para pengguna laporan keuangan (Hendriyani dan Tahar, 2015).

Berdasarkan *Internal Control-Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* (2015), Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personel-personel lainnya yang dirancang guna memberikan keyakinan penuh tentang mengenai pencapaian tiga tujuan berikut ini yaitu : 1) Keandalan dari pelaporan keuangan; 2) Efektivitas dan efisiensi operasi; 3) Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Komponen-Komponen Pengendalian Internal

Berdasarkan *Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission(COSO)*.Pengendalian Internal satuan usaha terdiri atas komponen-komponen berikut : 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penaksiran risiko; 3) Informasi dan komunikasi; 4) Aktivitas pengendalian;5) Pemantauan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperoleh ma unsur sebagai berikut : 1) Pengendalian Lingkungan; 2) Penaksiran Resiko; 3) Informasi dan Komunikasi; 4) Kegiatan Pengendalian; 5)

Pemantauan Pengendalian Intern.

Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2013:163), tujuan sistem pengendalian internal adalah : Menjaga kekayaan organisasi, Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, Mendorong efisiensi, danMendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Penerapan sistem pengendalian internal bermaksud untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, penyelewengan, penghambatan, pemborosan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan saran serta penerapan tugas-tugas organisasi. Tujuan pengendalian internal juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan manajerial guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan keterkaitan dalam pencapaian tujuan serta pelaksanaan tugas organisasi.

Transparansi Keuangan Daerah

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, yaitu : 1) Komunikasi publik oleh pemerintah, merupakan suatu kompleksitas pilihan-pilihan yang dinyatakan oleh banyak orang yang berkaitan dengan sesuatu isu yang dipandang penting oleh umum; 2) Hak masyarakat terhadap akses informasi, Informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya dalam segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Pada masa ini, Pemerintah telah menerapkan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari suatu prosedur pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang berlangsung selama satu periode buku yang bersakutan serta merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap karya atas penyelenggaraan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan FASB dalam SFAC No. 1 menyebutkan bahwa "Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya, yang berkaitan langsung atau tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik dan lain-lain".

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007: 3) tujuan dari laporan keuangan adalah: 1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi; 2) Memenuhi

kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna; 3) Menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen (*stewardship*) atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menilai akuntabilitas dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, serta politik dengan : 1) Menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; 2) Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan guna membiayai keseluruhan pengeluaran; 3) Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan membiayai keseluruhan kegiatannya serta mencukupi kebutuhan kasnya; 4) menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; 5) Menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hipotesis

H₁ :Diduga bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

H₂ :Diduga bahwa Transparansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai

dengan tujuan penelitian. Sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 55 responden. Konsep dalam penelitian ini ada tiga yaitu Sistem Pengendalian Internal (X_1), Transparansi Keuangan Daerah (X_2) dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y). Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Koefisien Determinasi, dan uji parsial t . Penelitian

ini dilaksanakan pada kantor BPKAD Kabupaten Luwu Utara.

PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah regresi linier untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari satu variable independent (variabel X) terhadap variable dependent (variabel Y).

Tabel 4.5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,208	3,815		1,890	,064
Sistem Pengendalian Internal	,272	,102	,282	2,669	,010
Transparansi Keuangan Daerah	,603	,116	,549	5,192	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Sumber: Pengolahan data SPSS 2020

Rumus yang didapatkan dari hasil pengujian:

$$Y = 7,208 + 0,272X_1 + 0,603X_2 + e$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.5 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik di atas sebesar 7,208 artinya apabila sistem pengendalian internal dan transparansi keuangan daerah sama dengan nol, maka kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara tetap sebesar 7,208.
- 2) Variabel sistem pengendalian internal memiliki koefisien regresi sebesar 0,272. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen variabel sistem

pengendalian internal dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,272 atau 27,2%.

- 3) Variabel transparansi keuangan daerah memiliki koefisien regresi sebesar 0,603. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen variabel transparansi keuangan daerah, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,603 atau 60,3%.
- 4) Hasil Uji Koefisien determinasi Untuk mengukur besarnya proporsi atau presentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan pengujian koefisien determinan.

Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,694 ^a	,482	,462	1,63981

a. Predictors: (Constant), Transparansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal

Sumber: Pengolahan data SPSS 2020

Hasil Analisis uji koefisien determinasi tersebut dapat terlihat pada tabel 4.7 dari adjusted R Square sebesar 0,462 menunjukkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan diperjelas oleh 2 variabel yaitu sistem pengendalian internal dan transparansi keuangan daerah sebesar 46,2% sisanya 53,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Tabel 4.6 Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,208	3,815		1,890	,064
Sistem Pengendalian Internal	,272	,102	,282	2,669	,010
Transparansi Keuangan Daerah	,603	,116	,549	5,192	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Sumber: Pengolahan data SPSS 2020

1) Uji Hipotesis 1: Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.6, variabel sistem pengendalian internal memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,010 yang lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai t_{hitung} positif 2,669 yang lebih besar dari t_{tabel} 2,004, sehingga variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan dan dapat dikatakan bahwa H_1 mendukung hasil penelitian, hal ini menunjukkan apabila sistem

Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk meneliti pengaruh apakah sistem pengendalian internal dan transparansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kabupaten Luwu Utara yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai *probability t* lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, sedangkan jika nilai *probability t* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

pengendalian internal ditingkatkan maka kualitas penyajian laporan keuangan juga akan meningkat.

2) Uji Hipotesis 2: Pengaruh transparansi keuangan daerah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.6, variabel transparansi keuangan daerah memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai t_{hitung} positif 5,192 yang lebih besar dari t_{tabel} 2,004, sehingga variabel transparansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan dan

dapat dikatakan bahwa H₂ mendukung hasil penelitian, hal ini menunjukkan apabila transparansi keuangan daerah meningkat maka kualitas penyajian laporan keuangan juga akan meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan transparansi keuangan daerah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kabupaten Luwu Utara. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kabupaten Luwu Utara.
2. Transparansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kabupaten Luwu Utara.

SARAN

DAFTAR RUJUKAN

- Afiah, N.N. dan P.C. Azwari. 2015. The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and Its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government In South Sumatera. Global Conference on Business and Social Science. 17-18 September 2015. Procedia-Social and Behavioral Sciences Elsevier: 811-818.
- Benawan, E. T. P., Saerang, D. P., & PONTOH, W. (2018). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Pegawai (studi kasus pada dinas perhubungan Kota Tidore Kepulauan). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).
- COSO,(2015), *Internal Control Integrated Framework*, New York : AIGPA's Publication Division
- Erlina dan Rasdianto, 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Penerbit Brama Ardian, Medan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumber pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu akuntansi sektor publik, serta kontribusi dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai sistem pengendalian internal dan transparansi keuangan daerah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan daerah, serta sebagai masukan dan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan.
3. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan sampel yang lebih banyak lagi, sehingga kemampuan generalisasinya untuk memperlihatkan kualitas laporan keuangan menjadi lebih kuat.
4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 : 1. (1-17).
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*, Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2.
- Mardiasmo.(2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V ANDI.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Monika, P., A.Syahroza, dan V. Diyanti. 2016. The Effect of Audit Opinion and Corruption on Local Government Performance. *Simposium Nasional Akuntansi 19*. Universitas Lampung: 1-26.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 Tentang Anggaran Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Nuansa Aulia.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Sari, S.P. dan B. Witono. 2014. Keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi. *Seminar Nasional dan Call for Paper Research Methods and Organizational Studies*, 418-425
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2015), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan. Lembaran Negara RI Tahun 1974. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Widyaningsih, A., A. Triantoro, dan L.S. Wiyantoro. 2011. Hubungan efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern dengan kualitas akuntabilitas keuangan : Kualitas informasi laporan keuangan sebagai variabel intervening (Penelitian pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemda Kabupaten/Kota Wilayah Propinsi Jawa Barat. Simposium Nasional Akuntansi 14. Universtas Syiah Kuala Banda Aceh: 1-35.

(<https://www.luwuutarakab.go.id>)